

BAB 2

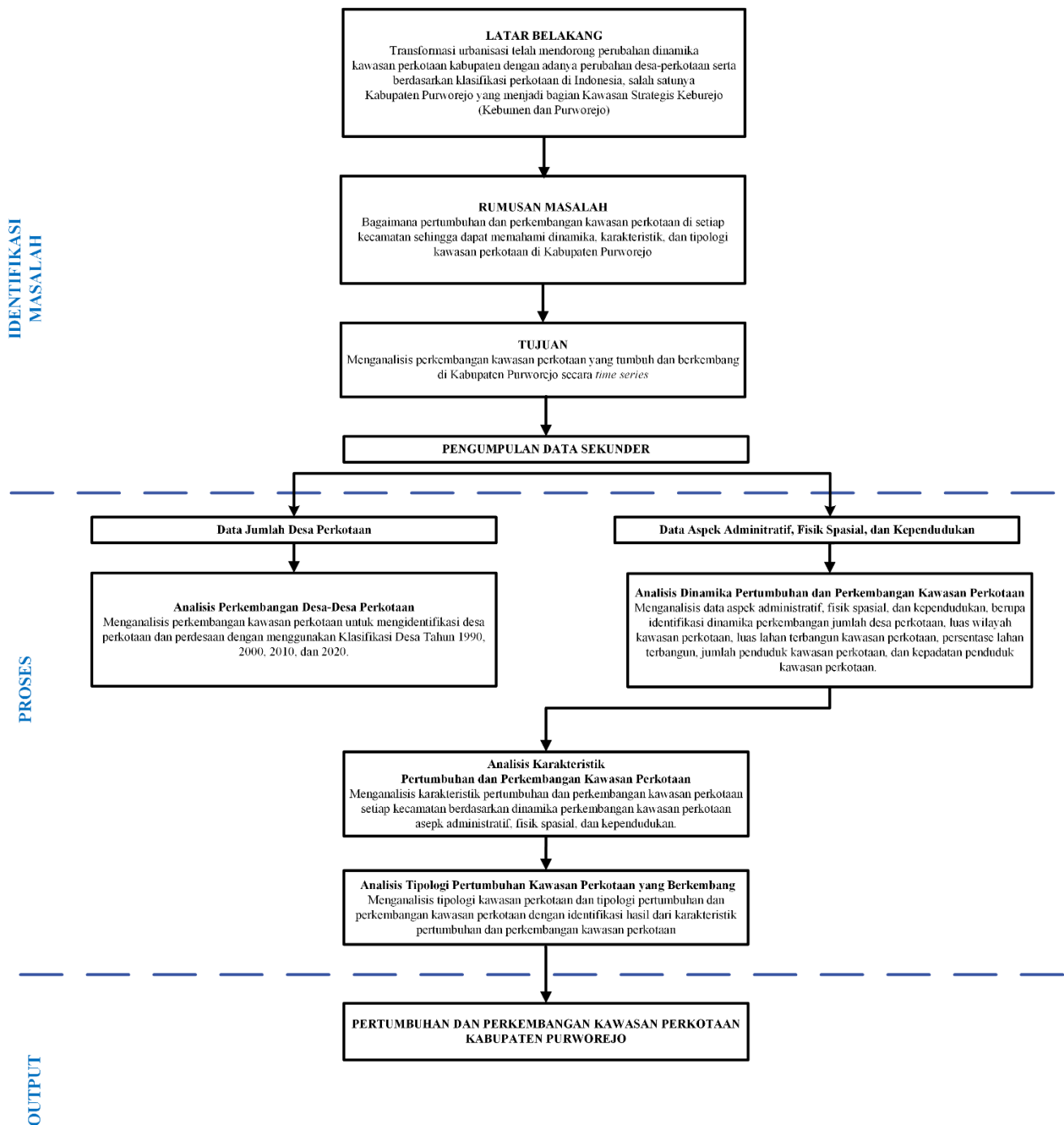
KONSEP PERENCANAAN

Konsep perencanaan menjadi landasan utama yang menjelaskan secara komprehensif mengenai rangkaian rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai output perencanaan dengan menentukan tahapan-tahapan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan yang tepat sasaran. Penelitian ini memiliki konsep perencanaan dalam bentuk kerangka pemikiran yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari identifikasi permasalahan meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pada penelitian; proses meliputi pengumpulan data hingga proses analisis yang digunakan; sehingga terdapat output berupa pertumbuhan dan perkembangan spasial kawasan perkotaan Kabupaten Purworejo yang menghasilkan penerapan strategi dan kebijakan yang relevan dengan kondisi spasial dan kependudukan di wilayah kajian. Kerangka konsep perencanaan berfungsi sebagai peta konseptual yang mengintegrasikan berbagai variabel penting yang digunakan dalam merumuskan solusi perencanaan yang efektif dan adaptif. Pendekatan yang digunakan tidak hanya menitikberatkan pada aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dimensi fungsional, sehingga output perencanaan tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memperhitungkan dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di masa mendatang.

Adanya kajian literatur menjadi fondasi penting yang memberikan landasan teoritis dan empiris yang memperkuat validitas dan reabilitas penelitian ini, serta pemahaman dalam dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan. Kajian literatur mulai dari pendefinisian serta dasar perkembangan desa perkotaan dari urbanisasi, definisi perkotaan dan perdesaan, potensi desa hingga indikator klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan; dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan terdiri dari jumlah penduduk, kepadatan penduduk hingga *Global Human Settlement Built-Up Surface (GHS Built-Up Surface)*; serta tipologi kawasan perkotaan meliputi bentuk aglomerasi kawasan perkotaan serta pola pertumbuhan kawasan perkotaan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir “Pertumbuhan dan Perkembangan Spasial Kawasan Perkotaan di Kabupaten Purworejo”.

2.1. Kerangka Konsep Perencanaan

Kerangka konsep perencanaan yang disusun dalam bentuk kerangka pemikiran yang mengalir secara sistematis mulai dari pengkajian fenomena hingga pencapaian hasil luaran. Konsep struktur yang sistematis memudahkan pemahaman dan penguraian permasalahan sehingga rumusan masalah dapat terjawab dan tujuan penelitian dapat tercapai. Kerangka konsep perencanaan tersebut divisualisasikan pada **Gambar 2.1**.



Sumber: Penulis, 2025

Gambar 2. 1. Kerangka Konsep Perencanaan

Konsep perencanaan yang didasarkan pada kajian literatur, diawali dengan pembahasan terkait adanya transformasi urbanisasi global di dunia yang mendorong adanya perubahan dinamika kawasan perkotaan kabupaten dengan adanya perubahan desa-perkotaan di Indonesia. Salah satunya Kabupaten Purworejo yang menjadi bagian dari kawasan strategis Keburejo (Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo). Kabupaten Purworejo terus mengalami pertumbuhan penduduk, maka dari itu memunculkan hubungan antara pertumbuhan penduduk dan perluasan lahan terbangun terhadap perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Purworejo. Perlu dilakukan pengkajian terkait tipologi kawasan pertumbuhan perkotaan yang berkembang dengan analisis pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Purworejo dari aspek kependudukan dan aspek kewilayahan. Perumusan tipologi kawasan pertumbuhan perkotaan yang berkembang dimulai dengan pengumpulan data sekunder. Data yang digunakan terdiri dari data potensi desa tahun 1990 dan 2000, data klasifikasi desa perkotaan dan perdesaan tahun 2010 dan 2020, data jumlah penduduk tahun 1990, 2000, 2010, dan 2020, data luas wilayah desa perkotaan dan desa perdesaan dengan *GHS built-up surface*.

Pertama mengidentifikasi perkembangan desa perkotaan, kemudian dilakukan analisis dinamika pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan yang dilakukan dengan aspek administratif, analisis *time series* aspek kependudukan dan analisis *time series* aspek fisik spasial. Dari analisis tersebut, kemudian dilakukan analisis karakteristik pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan setiap kecamatan di Kabupaten Purworejo. Terakhir dilakukan analisis tipologi pertumbuhan kawasan perkotaan yang berkembang berdasarkan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan setiap kecamatan di Kabupaten Purworejo yang menghasilkan tipologi kawasan perkotaan dan tipologi pertumbuhan dan perkembangan kawasan perkotaan. Hasil akhir atau output yang akan dihasilkan yaitu berupa pertumbuhan dan perkembangan spasial kawasan perkotaan di Kabupaten Purworejo.

2.2. Perkembangan Desa Perkotaan

2.2.1. Urbanisasi

Urbanisasi adalah peristiwa di mana penduduk berpindah dari wilayah perdesaan ke perkotaan, menyebabkan perubahan dalam tata ruang dan cara hidup, baik di perdesaan maupun perkotaan (Mcgranahan & Satterthwaite, 2014). Mobilitas penduduk dapat menandai proses perubahan wilayah yang mencirikan perdesaan menjadi perkotaan serta terjadi dengan pesat dari tahun ke tahun. Urbanisasi fenomena peningkatan proporsi populasi yang tinggal di daerah perkotaan, yang dapat terjadi karena pertumbuhan alami

penduduk perkotaan, migrasi dari perdesaan ke perkotaan, atau reklasifikasi wilayah perdesaan menjadi perkotaan karena perkembangan ekonomi dan infrastruktur (Jones & Mulyana, 2015). Urbanisasi tidak hanya sebagai fenomena demografis dari pertumbuhan penduduk di perkotaan tetapi juga hasil dari migrasi penduduk dan reklasifikasi penduduk berdasarkan fungsi dan kepadatan penduduk, urbanisasi juga tantangan di masa mendatang yang erat kaitannya dengan transformasi ekonomi menuju sektor industri dan jasa, yang mengkonsentrasikan kegiatan ekonomi perkotaan (Firman dkk., 2007).

2.2.2. Kawasan Perkotaan

Kawasan perkotaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Menurut peraturan pemerintah tersebut kawasan perkotaan diklasifikasikan menjadi dua yaitu, kota otonom dan kota non-otonom. Kota otonom memiliki kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kota otonom memiliki kawasan perkotaan yang pertumbuhannya relatif cepat. Selain itu pertumbuhan kawasan perkotaan yang semakin berkembang meluas di Indonesia sehingga memicu tumbuhnya banyak kawasan perkotaan kabupaten. Kawasan perkotaan mendorong adanya transformasi urbanisasi yang membentuk kota-kota kecil di kabupaten tersebut secara bertahap berubah dari kondisi perdesaan menjadi daerah yang lebih terurbanisasi (Mardiansjah dkk., 2021). Bahkan Mardiansjah dkk., 2021 menjelaskan bahwa kawasan-kawasan perkotaan non-otonom di wilayah kabupaten terbentuk dari gabungan desa-desa perkotaan yang berkembang secara terus menerus. Daerah perkotaan dapat diklasifikasikan berdasarkan standar layanan minimum dan norma, standar, prosedur, dan kriteria fasilitas layanan perkotaan, seperti infrastruktur, fasilitas, dan utilitas publik.

2.2.3. Potensi Desa

Potensi Desa (PODES) adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang potensi spesifik yang dimiliki oleh wilayah di tingkat desa atau terkecil (*small areas*). Survei ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi rinci tentang karakteristik potensi desa serta pemahaman dinamika desa perkotaan dan perdesaan (Pristania & Wilantika, 2022). Hasil dari pendataan potensi desa berupa pendataan terhadap ketersediaan infrastruktur, potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki administrasi setingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Big dkk., 2020).

Definisi pengklasifikasian desa perkotaan dan desa perdesaan berdasarkan kriteria yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik meliputi tiga kriteria utama, yaitu kepadatan penduduk sebesar 5.000 jiwa/km², persentase rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian kurang lebih sebesar 25%, serta memiliki keberadaan delapan atau lebih jenis fasilitas perkotaan (Firman dkk., 2007). Indikator klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan menurut data potensi desa pada tahun 1990 dan 2000 dapat dilihat pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.1. Indikator Klasifikasi Desa Perkotaan-Perdesaan menurut PODES Tahun 1990 dan Tahun 2000

Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Jumlah Rumah Tangga yang Bekerja di Sektor Pertanian (%)	Jumlah Fasilitas Perkotaan*	Skor
<500	>95%	-	1
500-999	91-95	0	2
1000-1499	86-90	1	3
1500-1999	76-85	2	4
2000-2499	66-75	3	5
2500-2999	56-65	4	6
3000-3499	46-55	5	7
3500-3999	36-45	6	8
4000-4999	26-35	7	9
>4999	<26	8	10

*Fasilitas perkotaan meliputi, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Bioskop, Rumah Sakit, Puskesmas, Jalan yang dapat dilewati oleh kendaraan roda 3-4, Kantor Pos, Supermarket, Pusat Perbelanjaan, Bank, Industri, Restoran, Jasa penyewaan listrik maupun jasa peralatan pesta.

Sumber: (Jones & Mulyana, 2015)

2.2.4. Definisi Desa Perkotaan dan Desa Perdesaan

a. Desa Perkotaan (*Urban*)

Perkotaan adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.

b. Desa Perdesaan (*Rural*)

Perdesaan (*rural*) adalah daerah yang didefinisikan sebagai daerah di luar perkotaan dengan kegiatan ekonomi utama pertanian. Ciri dari perdesaan terdapat kelompok penduduk kecil dengan kepadatan rendah. adalah suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi persyaratan tertentu dalam hal

kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya.

Tabel 2.2. Definisi Desa-Kota di Indonesia Berdasarkan Regulasi Berlaku

Dasar Regulasi	Perkotaan/Urban	Perdesaan/Rural
Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	Wilayah yang memiliki kegiatan utama selain pertanian, dengan struktur fungsional wilayah sebagai tempat pemukiman perkotaan, pusat distribusi layanan pemerintah, layanan sosial, dan aktivitas ekonomi	Wilayah yang berfokus pada sektor pertanian melibatkan pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi utama kawasan sebagai lokasi pemukiman pedesaan, layanan pemerintah, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi
Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	Wilayah dengan batas tertentu dengan sebagian besar penduduk berfokus pada sektor industri dan jasa	
Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa		Wilayah yang berfokus pada sektor pertanian, melibatkan pengelolaan sumber daya alam dengan mencakup fungsi sebagai wilayah permukiman desa, penyedia layanan pemerintah, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 120 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia 2020	Suatu wilayah administratif yang diidentifikasi sebagai desa perkotaan berdasarkan kriteria kepadatan penduduk per kilometer persegi, proporsi keluarga mandiri dalam sektor pertanian, dan ketersediaan atau aksesibilitas fasilitas perkotaan dan mempunyai total skor/nilai 9 atau lebih	Suatu wilayah administratif yang diidentifikasi sebagai desa perdesaan berdasarkan kriteria kepadatan penduduk per kilometer persegi, proporsi keluarga mandiri dalam sektor pertanian, dan ketersediaan atau aksesibilitas fasilitas perkotaan dan mempunyai total skor/nilai di bawah 9

Sumber: Penulis, 2025

2.2.5. Indikator Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan

Klasifikasi desa perkotaan dan desa perdesaan di Indonesia didasarkan pada data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Penetapan klasifikasi desa perkotaan-perdesaan dilakukan secara berkala (*time series*) dari pendataan Potensi Desa (PODES) tahun 1990 dan 2000, serta Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia dan Peraturan Kepala BPS Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia. BPS melakukan pembaruan terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam proses klasifikasi tahun 2010 dan 2020 sehingga memperlihatkan perbedaan identifikasi melalui proses reklasifikasi tersebut (Sumarwati dkk., 2018). Perubahan variabel ini memperlihatkan adanya dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam proses pertumbuhan kawasan perkotaan, yang ditunjukkan melalui perubahan jumlah serta luas wilayah kawasan perkotaan.

Tabel 2. 3. Indikator Klasifikasi Desa Perkotaan-Perdesaan menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2010 dan Tahun 2020

Indikator Klasifikasi Desa Perkotaan-Perdesaan Tahun 2010							Indikator Klasifikasi Desa Perkotaan-Perdesaan Tahun 2020						
Kriteria				Keberadaan/akses pada fasilitas Perkotaan			Kriteria				Keberadaan/akses pada fasilitas Perkotaan		
Kepadatan Penduduk Per Km ²	Nilai/ Skor	Persentase Rumah Tangga Pertanian	Nilai/ Skor	Fasilitas Perkotaan	Kriteria	Nilai/ Skor	Kepadatan Penduduk Per Km ²	Nilai/ Skor	Persentase Rumah Tangga Pertanian	Nilai/ Skor	Fasilitas Perkotaan	Kriteria	Nilai/ Skor
<500	1	>70,00	1	a. TK	▪ Ada atau ≤ 2,5 Km ▪ ≥ 2,5 Km	1 0	<500	1	>70,00	1	a.TK	▪ Ada atau ≤ 2,5 Km ▪ ≥ 2,5 Km	1 0
500 – 1.249	2	50,00 – 69,99	2	b.SMP			500 – 1.249	2	50,00 – 69,99	2	b.SMP		
1.250 – 2.499	3	30,00 – 49,99	3	c.SMU			1.250 – 2.499	3	30,00 – 49,99	3	c.SMU		
2.500 – 3.999	4	20,00 – 29,99	4	d.Pasar	▪ Ada atau ≤ 2 Km ▪ ≥ 2 Km	1 0	2.500 – 3.999	4	20,00 – 29,99	4	d.Pasar	▪ Ada atau ≤ 2 Km ▪ ≥ 2 Km	1 0
4.000 – 5.999	5	15,00 – 19,99	5	e.Pertokoan			4.000 – 5.999	5	15,00 – 19,99	5	e.Pertokoan		
6.000 – 7.499	6	10,00 – 14,99	6	f.Bioskop	▪ Ada atau ≤ 5 Km ▪ ≥ 5 Km	1 0	6.000 – 7.499	6	10,00 – 14,99	6	f.Rumah Sakit	▪ Ada atau ≤ 5 Km ▪ ≥ 5 Km	1 0
7.500 – 8.499	7	5,00 – 9,99	7	g.Rumah Sakit			7.500 – 8.499	7	5,00 – 9,99	7	g.Hotel/Bilyar/ Diskotek/Panti Pijat/Salon		
>8500	8	< 5,00	8	h.Hotel/Bilyar/ Diskotek/Panti Pijat/Salon	▪ Ada ▪ Tidak Ada	1 0	>8500	8	< 5,00	8	h.Persentase RT Telepon	▪ ≥ 8,00 ▪ <8,00	1 0
				i. Persentase RT Telepon	▪ ≥ 8,00 ▪ <8,00	1 0					i.Persentase RT Listrik	▪ ≥ 9,00 ▪ < 9,00	1 0
				j.Persentase RT Listrik	▪ ≥ 9,00 ▪ < 9,00	1 0							

Sumber: Perka BPS No. 37 Tahun 2010 dan Perka BPS No. 120 Tahun 2020

2.3. Dinamika Pertumbuhan dan Perkembangan Kawasan Perkotaan

2.3.1. Jumlah Penduduk

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama 1 tahun atau lebih. Jumlah penduduk dihitung dengan metode sensus atau dengan metode perhitungan pertumbuhan penduduk. Sensus yang dimaksud pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam periode lima tahunan. Dalam melakukan pendataan tersebut, biasanya terdapat petugas yang mendatangi rumah-rumah dalam suatu daerah serta mendata jumlah anggota keluarga yang ada dalam rumah tersebut. Berdasarkan ukuran penduduknya, jumlah penduduk kawasan perkotaan di kabupaten pada penelitian ini digunakan sebagai salah satu variabel untuk melihat klasifikasi kawasan perkotaan. Klasifikasi jumlah penduduk kawasan perkotaan di kabupaten berdasarkan dibagi menjadi beberapa kategori meliputi kawasan perkotaan besar (*large-size towns*) memiliki populasi dengan jumlah penduduk lebihh dari 100.000 jiwa, kawasan perkotaan sedang (*medium-size towns*) dengan populasi jumlah penduduk 50.000-100.000 jiwa, kawasan perkotaan kecil (*small-size towns*) dengan populasi jumlah penduduk 30.000-50.000 jiwa dan kawasan perkotaan mikro (*smaller-size towns*) memiliki populasi jumlah penduduk kurang dari 30.000 jiwa (Mardiansjah dkk., 2022). Klasifikasi ini digunakan untuk memahami tingkat perkembangan dan skala urbanisasi di wilayah tertentu.

2.3.2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah suatu indikator dari tekanan penduduk di suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik adalah jumlah individu yang hidup per satuan luas kilometer persegi. Kepadatan penduduk adalah satuan ukuran yang menunjukkan banyaknya jiwa atau penduduk yang tinggal dalam satu kilometer persegi wilayah. Angka ini berfungsi sebagai variabel kunci dalam menilai hubungan antara suatu wilayah dan populasinya, yang sering digunakan dalam analisis demografi. Memahami kepadatan penduduk melibatkan pertimbangan berbagai metode penghitungan, faktor yang mempengaruhi, dan dampaknya yang beragam terhadap perencanaan kota, pertumbuhan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan lingkungan.

Kepadatan penduduk diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Kepadatan Bruto

Kepadatan bruto dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah administrasi.

$$\text{Kepadatan Bruto} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Total (Jiwa)}}{\text{Luas Wilayah Administrasi}}$$

b. Kepadatan Netto

Kepadatan netto dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi dengan luas lahan terbangun.

$$\text{Kepadatan Netto} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Total (Jiwa)}}{\text{Luas Wilayah Terbangun}}$$

2.3.3. Klasifikasi Kepadatan Penduduk Perkotaan

Kriteria klasifikasi kepadatan penduduk untuk melihat ukuran kepadatan kota biasanya menggunakan ambang batas tertentu dalam jumlah penduduk per km². Klasifikasi ini membantu dalam memahami derajat urbanisasi secara global dan sesuai dengan konsep yang dikembangkan oleh (Dijkstra dkk., 2021). Ukuran kota didefinisikan mencakup pada tiga kategori:

- a. Kepadatan tinggi dengan kisaran kepadatan penduduk ≥ 1.500 jiwa/km²
- b. Kepadatan sedang memiliki kepadatan penduduk 300 – 1.499 jiwa/km²
- c. Kepadatan rendah jika kurang dari 300 jiwa/km²

2.3.4. *Global Human Settlement Built-Up Surface (GHS Built-Up Surface)*

Global Human Settlement Layer (GHSL) merupakan hasil data spasial global dan analisis yang memberikan wawasan distribusi dan karakteristik dari keberadaan manusia. Data ini memberikan informasi area terbangun yang telah disempurnakan termasuk pengukuran permukaan, volume, dan ketinggian, serta data populasi (Corbane dkk., 2020). *GHS built-up surface* memberikan data permukaan bangunan. Kumpulan data (periode 1975 hingga 2020, interval 5 tahun) dan masa depan (2025 dan 2030). Estimasi sub-pixel *built-up fraction* pada resolusi 10m dihasilkan dari komposit citra Sentinel-2 beresolusi 10m, dengan menggunakan set pembelajaran berupa komposit data dari *GHS-BUILT-S2 R2020A*, sehingga resolusi spasial sebesar 100m x 100m. Informasi yang didapat menggambarkan permukiman bangunan seperti, *Open Street Map (OSM)*. *GHS Built-Up Surface* dapat dimanfaatkan untuk melihat perkembangan luasan lahan terbangun secara berkala (*time series*) (Pesaresi dkk., 2024).

2.4. Tipologi Pertumbuhan dan Perkembangan Kawasan Perkotaan

2.4.1. Bentuk Aglomerasi Kawasan Perkotaan

Aglomerasi kawasan perkotaan adalah bentuk spasial kompleks yang terjadi seiring dengan adanya pertumbuhan dan integrasi kawasan perkotaan yang berkembang, ditandai dengan hubungan antar kawasan yang menghasilkan kelompok kota yang saling terhubung melalui berbagai ikatan secara sosial-ekonomi maupun spasial. Aglomerasi berkembang melalui proses evolusi bentuk kawasan perkotaan yang mengalami perluasan secara ekstensif dan melibatkan pertumbuhan yang bersifat *self-organizing* serta interaksi antar elemen di dalamnya (Fang & Yu, 2017). Aglomerasi kawasan perkotaan terdapat berbagai jenis, untuk penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis pengelompokan aglomerasi antara lain.

a. Aglomerasi perkotaan tunggal

Aglomerasi tunggal merupakan hasil dari pertumbuhan kawasan perkotaan yang terdiri dari satu kawasan utama yang dominan dan berfungsi sebagai pusat utama kegiatan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Pertumbuhan perkotaan dalam aglomerasi tunggal saling berbatasan secara fisik, membentuk kesatuan spasial yang saling terpadu dan terintegrasi. Tingkat integrasi terlihat dari perkembangan ruang yang saling terhubung, sehingga menciptakan konsentrasi aktivitas yang terpusat, sehingga aglomerasi tunggal memperlihatkan konsolidasi ruang perkotaan yang homogen dan dominan pada satu pusat perkotaan.

b. Aglomerasi perkotaan dobel

Aglomerasi dobel merupakan kawasan perkotaan yang terbagi menjadi dua aglomerasi yang berkembang secara signifikan serta memiliki keterkaitan interaksi sosial, ekonomi dan infrastruktur. Meskipun aglomerasi dobel saling terhubung, secara geografis kedua aglomerasi tidak berbatasan langsung, sehingga membentuk dua kawasan perkotaan yang saling terpisah.

c. Aglomerasi perkotaan dengan satelit

Aglomerasi dengan satelit adalah aglomerasi tunggal yang memiliki desa perkotaan atau gabungan dari desa perkotaan yang tumbuh disekitar kawasan inti sebagai satelit namun, tidak saling bergabung. Pola ini umumnya di temukan pada kawasan perkotaan yang sedang berkembang, di mana satelit membantu mengurangi tekanan kepadatan dan menyediakan ruang untuk aktivitas pendukung.

2.4.2. Pola Pertumbuhan Perkotaan

Pola pertumbuhan perkotaan adalah fenomena yang mengacu pada karakteristik perubahan spasial karena adanya transformasi urbanisasi (Sapena & Ruiz, 2021).

1. Pola pertumbuhan ekspansi (edge-expansion) pertumbuhan yang terjadi dari perbatasan atau pinggiran kawasan perkotaan yang telah ada, sehingga memperluas cakupan kawasan perkotaan ke arah luar.
2. Pola pertumbuhan kompak (compact) merupakan pertumbuhan kawasan terbangun yang dilakukan melalui densifikasi, mengisi (infill), atau memanfaatkan kembali lahan kosong dalam kawasan perkotaan, sehingga menjadi lebih padat.
3. Pola pertumbuhan tersebar (dispersed/sprawl) merupakan pertumbuhan kawasan perkotaan yang terjadi secara tersebar dan tidak terkontrol di luarbatas kawasan perkotaan, seringkali terjadi pada kepadatan rendah dan jarak antar permukiman yang jauh.
4. Pola berbasis jalan (ribbon/road-based) merupakan pola pertumbuhan mengikuti jaringan jalan utama, yang membentuk pola linear atau memanjang di sepanjang koridor transportasi.
5. Pola pertumbuhan melompat (leapfrog) merupakan pola pertumbuhan kawasan perkotaan yang memunculkan pusat-pusat kawasan perkotaan baru yang terpisah dari inti kawasan perkotaan utama, atau sering disebut sebagai pertumbuhan satelit.